

## Pagelaran Demokrasi ala Jokowi: antara Panggung Politik dan Pewarisan Tradisi Jawa

---

Intan Wulan R.<sup>1</sup>; Ahmad Dhani Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret

Email: [intanwulanr23@gmail.com](mailto:intanwulanr23@gmail.com)

---

### Abstract

*Pagelaran demokrasi ala Jokowi, sebuah seni tarian politik yang diwarnai dengan gaya dan pewarisan tradisi Jawa, menawarkan pertunjukan yang memikat. Melalui metode sejarah, penelitian ini menelusuri bagaimana Jokowi menggabungkan politik kontemporer dengan nilai-nilai adat Jawa. Jokowi, yang sering digambarkan sebagai "Raja Jawa" modern, menggunakan strategi komunikasi yang merakyat dan kebijakan populis untuk membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Namun, di balik kesederhanaan dan kedekatannya, timbul berbagai pertanyaan tentang efektivitas dan keberlanjutan kebijakan-kebijakannya. Penelitian ini mengungkap ironi dan kontradiksi dalam kepemimpinan Jokowi, serta mengevaluasi apakah nilai-nilai tradisional Jawa benar-benar relevan dalam praktik demokrasi modern atau hanya menjadi alat pencitraan politik semata. Dengan pendekatan mendalam, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika kepemimpinan di Indonesia dan implikasinya bagi masa depan demokrasi.*

**Key words:** Demokrasi, Jokowi, Tradisi Jawa, Panggung Politik, Raja Jawa.

### Pendahuluan

Kepemimpinan adalah seni yang rumit, terutama di Indonesia, di mana tradisi dan modernitas seringkali bertabrakan dalam tarian politik yang memusingkan. Di tengah panggung politik yang penuh intrik ini, muncul sosok Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi, sosok yang berhasil memikat hati rakyat dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan merakyat.<sup>1</sup> Di bawah kepemimpinannya, demokrasi tampaknya memiliki sentuhan unik yang mencerminkan akar budaya Jawa. Namun, di balik citra yang sederhana tersebut, terdapat berbagai isu penting yang perlu ditelaah lebih dalam. Efektivitas dan keberlanjutan kebijakan yang diterapkan Jokowi menimbulkan sejumlah perdebatan, baik di kalangan pakar politik maupun masyarakat umum. Pagelaran demokrasi ala Jokowi dimaksudkan untuk menyingkap lapisan-lapisan kompleks dari hubungan antara kekuasaan politik dan warisan budaya. Artikel ini mengupas ironi dan kontradiksi dalam kepemimpinan Jokowi. Salah satu fokus utama kajiannya adalah meneliti bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa dipraktikkan dalam konteks demokrasi

---

<sup>1</sup> Tyas Titi Kinapti, "7 Bukti Kesederhanaan Jokowi, dari Jajan Kaki Lima sampai Naik Transportasi Umum", dalam *Liputan 6*, 21 Januari 2019, <https://www.liputan6.com/hot/read/3994825/7-bukti-kesederhanaan-jokowi-dari-jajan-kaki-lima-sampai-naik-transportasi-umum>, diakses pada 19 Oktober 2024.

kontemporer. Apakah nilai-nilai ini benar-benar diterapkan dengan tulus, ataukah hanya menjadi alat pencitraan politik semata. Hal ini sangat relevan untuk dipelajari mengingat populisme dan keinginan untuk tampil “dekat dengan rakyat” seringkali dianggap sebagai cara untuk meraih dukungan luas.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk mengurai jalinan antara politik dan budaya. Ketika berbicara tentang pagelaran, akan muncul teater besar di mana aktor-aktor memainkan peran yang sudah ditentukan. Demikian pula, Jokowi dengan cerdas memainkan peran sebagai “raja” dalam panggung politik kontemporer. Pendekatan mendalam yang digunakan dalam penelitian ini memberikan perspektif baru tentang dinamika kepemimpinan di Indonesia. Sebuah negara dengan beragam budaya dan tradisi, Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak hanya memahami keragaman ini tetapi juga mampu mengelolanya dengan bijak. Melalui analisis yang detail, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana pemimpin seperti Jokowi mampu memenuhi harapan tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah ini hanya sebuah pertunjukan politik Jokowi? Atau ada dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat. Pertanyaan ini selaras dengan tujuan utama penelitian, yakni untuk mengungkap bagaimana elemen-elemen budaya Jawa dimanifestasikan dalam kepemimpinan Jokowi dan apa implikasinya bagi praktik demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti cara-cara di mana simbolisme dan tradisi Jawa digunakan untuk memengaruhi opini publik dan kelancaran administrasi negara. Metode sejarah yang digunakan melibatkan analisis terhadap pidato, kebijakan, dan tindakan Jokowi, serta perbandingan dengan prinsip-prinsip dalam konsep Raja Jawa.

Dalam konsep Raja Jawa, seorang raja diharapkan memainkan peran sebagai pilar kesejahteraan dan kebijaksanaan. Figur raja bukan hanya bertugas sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol moralitas dan spiritualitas. Jokowi, dengan gaya kepemimpinannya yang khas, terlihat berusaha untuk memenuhi harapan-harapan ini. Mengadopsi gaya berkomunikasi yang sederhana, merakyat, tetapi penuh dengan makna tersirat, Jokowi menarik hati banyak rakyat Indonesia. Ia mendobrak kebiasaan politik tradisional dengan gaya komunikasinya yang lugas dan mudah dipahami. Tindakannya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti keterbukaan dan transparansi. Saat kampanye, Jokowi kerap mendatangi pasar dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.<sup>2</sup> Ini menunjukkan pendekatan politik yang ingin menghilangkan jarak antara pemimpin dan rakyat. Di sisi lain, pewarisan tradisi Jawa menuntut adanya keseimbangan antara angkara dan cinta kasih. Seorang pemimpin harus mampu menunjukkan ketegasan dalam menghadapi tantangan, namun tetap penuh kasih kepada rakyatnya. Dalam beberapa situasi, Jokowi nampaknya berhasil mengadopsi filosofi ini dalam pengambilan keputusannya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana konsep Raja Jawa dapat diterapkan secara efektif dalam konteks demokrasi kontemporer. Apakah perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan praktik politik kontemporer mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik? Atau justru hanya menjadi panggung sandiwara yang memperdaya rakyat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memahami dampak budaya terhadap proses demokrasi dan efeknya pada kesejahteraan rakyat. Penelitian ini juga akan menyoroti ketegangan yang mungkin muncul antara idealisme budaya dan realitas politik. Bagaimana Jokowi merancang kebijakan yang menghormati tradisi namun tetap relevan dengan tuntutan zaman? Dalam hal ini, konsep Raja Jawa menawarkan kerangka berpikir yang menarik. Seorang raja Jawa, diharapkan berperan sebagai “bapak” yang memimpin dengan

---

<sup>2</sup> Ajiakto Dwi Nugroho dan Bimo, *Jokowi: Politik tanpa Pencitraan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 5-10.

*potehi* (kebajikan) dan mampu mengatasi masalah yang timbul dengan *ngajeni* (penghormatan). Penerapan konsep ini dalam konteks politik Jokowi akan menjadi salah satu fokus penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian ini akan membahas bagaimana Jokowi menggunakan simbolisme dan ritual dalam acara-acara kenegaraan untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin yang selaras dengan tradisi. Misalnya, penggunaan pakaian adat Jawa dalam acara resmi, serta penggunaan retorika yang mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal. Apakah ini memang mencerminkan komitmen mendalam terhadap budaya Jawa atau hanya sekadar strategi untuk memenangkan hati rakyat? Untuk menyimpulkan, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami kompleksitas kepemimpinan Jokowi dalam konteks budaya dan politik. Dengan menelusuri hubungan antara konsep Raja Jawa dan praktik politik kontemporer dapat ditemukan wawasan baru tentang bagaimana budaya dapat mempengaruhi proses demokrasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menawarkan perspektif mendalam tentang bagaimana tradisi dan modernitas dapat bersinergi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan manusiawi.

## Pembahasan

Presiden Joko Widodo, atau biasa dipanggil Jokowi, merupakan sosok yang memadukan demokrasi kontemporer dengan tradisi Jawa. Sejak menjabat sebagai Presiden, pengaruh budaya Jawa sangat kentara dalam gaya kepemimpinannya. Menilik lebih jauh ke dalam pemerintahannya akan ditemukan sebuah pagelaran demokrasi yang kian hari kian mirip dengan panggung politik tradisional Jawa. Berbagai manuver politik dan simbolisme yang ditampilkan oleh Jokowi dan para pendukungnya menggabungkan demokrasi kontemporer dengan tradisi feodal khas raja Jawa. Jika dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan olehnya, Jokowi tampak berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai Raja Jawa, dengan segala keistimewaan dan kekuasaan yang terpusat. Para raja Jawa ini dengan gigih mengumpulkan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan agar tetap terpusat pada satu orang. Seperti contoh, Soekarno yang menyatukan Nasakom, Jokowi juga memberikan banyak manuver politik yang terencana demi menjaga kekuatannya tetap solid di istana. Hal ini terlihat sejak awal periode kedua kepemimpinannya (2019-2024), dimana langkah-langkah politik Jokowi mencerminkan keinginan untuk tidak sekadar memimpin, tetapi juga mempertahankan dan mewariskan kekuasaan tersebut.

Pembicaraan “Raja Jawa” ini mulai mengemuka sejak akhir Agustus lalu, ketika publik diingatkan untuk tidak main-main dengan Raja Jawa jika tidak ingin celaka.<sup>3</sup> Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit siapa sosok “Raja Jawa” itu, banyak yang memastikan bahwa Jokowi adalah sosok yang dimaksud. Bagi masyarakat, pernyataan ini menjadi isyarat bahwa Jokowi disamakan seperti raja di masa lampau, tidak boleh dihadap atau dilawan. Ini merupakan satu dari banyak fenomena yang menggambarkan bagaimana Jokowi berusaha membangun citra dirinya sebagai Raja Jawa di tengah masyarakat. Semua bermula dari caranya dalam mengumpulkan kekuasaan, menempatkan anggota keluarganya di pos-pos strategis, hingga kontrol ketat terhadap berbagai institusi independen. Jokowi

---

<sup>3</sup>Dinda Shabrina, “Bahlil: Hati-hati Terhadap Raja Jawa kalau tidak Mau Celaka”, dalam *Media Indonesia*, 21 Agustus 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/694569/bahlil-hati-hati-terhadap-raja-jawa-kalau-tidak-mau-celaka>, diakses pada 19 Oktober 2024.

menggambarkan figur yang menghidupkan kembali simbol kekuasaan dan hierarki dalam pemerintahan, bukan sekadar sebagai pemimpin pilihan rakyat, tetapi lebih seperti sosok dalam tradisi feodal yang berkembang di tanah Jawa. Sebuah metafora yang, meskipun terkesan sembrono, sebenarnya memiliki benang merah yang saling menghubungkan antara strategi politiknya saat ini dengan seni pewarisan kekuasaan ala kerajaan. Untuk memahami lebih dalam, penting melihat kembali sejarah dan konsep politik raja Jawa yang dijelaskan oleh peneliti Indonesia, *Benedict Anderson*, dalam artikel *The Idea of Power in Javanese Culture*. Anderson menyatakan bahwa kekuasaan di Indonesia, khususnya di Jawa, bersumber dari spiritualitas dan simbolisme, berbeda dengan konsep kekuasaan Barat yang lebih berbasis pada interaksi sosial.<sup>4</sup>

Anderson menjelaskan bahwa kekuasaan di Jawa adalah sesuatu yang inheren dan tidak dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, kekuasaan adalah esensi dari seorang raja. Raja Jawa dianggap memiliki ‘wahyu’, semacam cahaya suci yang memberikannya otoritas dan kharisma. Wahyu ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh melalui penaklukan atau sumber daya, tetapi melalui kelahiran yang dianugerahkan oleh kekuatan spiritual. Selain itu, raja Jawa sering digambarkan sebagai pusat dari alam semesta. Lingkaran pengaruhnya meluas dari pusat ke pinggiran, mirip dengan konsep mandala. Istana atau kraton bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat spiritual dan kultural. Simbolisme ini sangat kuat dan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa, sehingga pendekatan kekuasaan ini akan memiliki dampak besar pada bagaimana raja menjalankan pemerintahan. Pemerintahan raja tidak bersifat birokratis tetapi lebih bersifat ritualistik. Setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan memiliki makna simbolis. Raja diharapkan dapat menjaga harmoni dan keseimbangan alam semesta. Oleh karenanya, stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat adalah cerminan dari kekuatan spiritual raja.<sup>5</sup>

Sebenarnya, pemaknaan dan realisasi simbol-simbol Raja Jawa bukan pada era Jokowi saja, melainkan sudah dimulai sejak era Soeharto, yang digadang-gadang sebagai Raja Jawa. Hal ini bukan omong-omong belaka, lantaran Soeharto memang dengan sengaja menampilkan hal yang demikian. Pemikiran tentang budaya Jawa dalam diri Soeharto, telah banyak ditulis oleh Soeharto sendiri dalam buku “Butir-butir Budaya Jawa”, di dalamnya berisi banyak hal mengenai kehidupan. Kandungan falsafah Jawa ini termaktub dalam isi kalimat *hanggayuh kasampurnaning hurip, berbudi bawaleksana, ngudi sejatining becik* (mencapai kesempurnaan hidup, berjiwa besar, mengusahakan kebaikan sejati).<sup>6</sup> Soeharto melihat dirinya sebagai pemimpin yang ideal dengan nilai-nilai Jawa, di mana ia percaya bahwa menjaga harmoni dan kebajikan adalah kunci dalam mengelola negara. Melalui simbolisme budaya ini, Soeharto menggambarkan dirinya sebagai pemimpin bijak yang jauh dari keributan politik. Ini membuat masyarakat merasa ada kedekatan antara dirinya dan budaya yang mereka anut. Gaya kepemimpinannya tidak terlepas dari karakter khas pemimpin Jawa. Ia menampilkan dirinya sebagai figur otoritatif yang penuh wibawa. Wibawa ini tidak hanya ditampilkan dalam tampilan publik, tetapi juga dalam kebijakannya. Soeharto seringkali menggunakan pendekatan halus namun tegas dalam menghadapi lawan

---

<sup>4</sup> Administrator, “Tafsir Jawa terhadap Kuasa dan Kekuasaan”, dalam *Indonesia.go.id*, 31 Juli 2019, <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/tafsir-jawa-terhadap-kuasa-dan-kekuasaan>, diakses pada 19 Oktober 2024.

<sup>5</sup> Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko, *Reinventing Indonesia: menemukan kembali masa depan bangsa* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2008), hlm. 10-15.

<sup>6</sup> Yusuf Wibisono, “Falsafah Bangsa dan Budaya Jawa dalam Pemikiran Soeharto”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 41 No. 68 (2020), <https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/874/0>

politiknya.<sup>7</sup> Bahkan setelah wafatnya, simbolisme Jawa pun tampak masih sangat melekat dalam diri Soeharto. Seperti Raja Jawa kebanyakan yang dimakamkan didaerah dataran tinggi, misalnya makam-makam Raja Imogiri Yogyakarta, makam Soeharto juga terletak di dataran tinggi lereng gunung Lawu. Makam ini semakin indah dengan ukiran dan pahatan khas Jawa yang memenuhi kompleks makam.

Setelah reformasi, Jokowi muncul sebagai sosok yang juga terinspirasi oleh filosofi Jawa. Meski Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan rakyat, ia juga tidak menanggalkan sama sekali nilai-nilai Jawa. Jokowi seringkali menggunakan istilah dan simbol budaya Jawa dalam pidato dan kebijakan publiknya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa ia adalah ‘pemimpin rakyat’ yang peduli pada akar budaya bangsa. Penerapan konkret lainnya, ketika Jokowi bertemu dengan masyarakat atau menghadiri rapat, ia sering memilih hari-hari tertentu yang memiliki makna khusus dalam budaya Jawa. Misalnya, pada hari kelahirannya yang juga sering diperingati dengan acara-acara adat. Hal ini tidak hanya mempererat hubungan dengan rakyat tetapi juga menunjukkan penghormatan kepada tradisi. Selain itu, Jokowi kerap juga menggunakan bahasa Jawa dalam pidato-pidatonya saat *blusukan* ke daerah yang mayoritas penduduknya berbahasa Jawa, yang menciptakan rasa dekat dan familiar di kalangan warga setempat. Dalam hal ini, Jokowi telah berhasil menyulap panggung politik Indonesia menjadi sesuatu yang dinamis dan terkadang tidak terduga. Contohnya adalah *blusukan* ini, yang awalnya dipandang skeptis oleh banyak pihak. Ternyata, strategi ini berhasil mendekatkan Jokowi dengan masyarakat, yang berarti bahwa popularitas Jokowi meningkat signifikan setiap kali ia melakukan *blusukan*.<sup>8</sup>

Tak hanya dalam hal bahasa dan tindakan, filosofi *prasojo* atau kesederhanaan juga tercermin dalam cara Jokowi berpakaian. Ia sering tampil dalam balutan pakaian tradisional Jawa, seperti batik dan blangkon, terutama dalam acara-acara formal dan kenegaraan. Ini menciptakan gambaran seorang pemimpin yang bangga akan budayanya dan tidak terpengaruh oleh arus modernisasi yang melupakan akar tradisi. Yang mana di era politik kontemporer ini, feodalisme telah banyak ditinggalkan dan dianggap tidak relevan lagi. Namun, menariknya, masih banyak pemimpin yang membawa gaya feodal dalam panggung politiknya. Mereka tampak menggunakan feodalisme sebagai ‘obat mujarab’ untuk menempatkan posisi keluarganya pada jabatan-jabatan penting di negara. Misalnya, di beberapa negara, dapat dilihat bagaimana dinasti politik terbentuk. Filipina memiliki keluarga Marcos, yang meskipun pernah turun dari kekuasaan, masih memiliki pengaruh kuat dalam politik.<sup>9</sup> Negara lain seperti India tak lepas dari pengaruh keluarga Nehru-Gandhi selama bertahun-tahun. Di Korea Utara, dapat dilihat bagaimana Kim Jong-un melanjutkan kepemimpinan dari ayah dan kakeknya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Wachid Eko Purwanto, “Konsep Pemikiran Soeharto dalam Butir-butir Budaya Jawa”, *Bahastra*, Vol. 37, No. 1 (2017), <https://adoc.pub/konsep-kepemimpinan-soeharto-dalam-butir-butir-budaya-jawa.html>

<sup>8</sup> Muhammad Nursyamsi, "Popularitas Melejit, Jokowi Disebut Sukses Sinergikan Kerja Para Menteri", dalam Republik, 23 Januari 2023, <https://news.republika.co.id/berita/roy12f502/popularitas-melejit-jokowi-disebut-sukses-sinergikan-kerja-para-menteri>, diakses pada 19 Oktober 2024.

<sup>9</sup> Kahfi Adlan Hafiz, “Memetik Pelajaran dari Fenomena Dinasti Politik Filipina”, dalam *detikNews*, 15 Juli 2022, <https://news.detik.com/kolom/d-6180297/memetik-pelajaran-dari-fenomena-dinasti-politik-filipina>, diakses pada 19 Oktober 2024.

<sup>10</sup> Rupert Wingfield-Hayes, “Kim Jong-un: Bukan ‘putra mahkota’ tapi akhirnya menjadi pemimpin Korea Utara”, dalam *BBC News Indonesia*, 4 Juni 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44355690>, diakses pada 19 Oktober 2024.

Di Indonesia sendiri tidak ketinggalan, ada beberapa contoh nyata penerapan feodalisme ini. Keluarga Yudhoyono adalah salah satu contohnya. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, juga terjun ke dunia politik dan mencoba mengikuti jejak ayahnya.<sup>11</sup> Selain itu, juga dapat dilihat bagaimana dinasti politik mulai terbentuk di beberapa daerah dengan anak-anak kepala daerah yang mulai mencalonkan diri sebagai penerus. Selanjutnya, ada Jokowi, ia turut meramaikan panggung politik kontemporer ini, dengan mulai memusatkan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarganya dalam posisi strategis, sebagai bentuk pewarisan kekuasaan. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, sebagai wakil presiden Indonesia yang baru, menjadi contoh nyata dari upayanya membangun dinasti politik.<sup>12</sup> Ini tidak hanya memperlihatkan Jokowi sedang membangun sebuah dinasti politik, tetapi juga menunjukkan bagaimana demokrasi di negeri ini semakin terpinggirkan oleh kekuatan dinasti kepemimpinan yang semakin mengakar, layaknya raja-raja Jawa masa lalu yang memusatkan kekuasaan pada satu keluarga atau dinasti. Konsep pewarisan kekuasaan ini tidak hanya berakar dari tradisi politik, tetapi juga dari spiritualitas Jawa yang mengukuhkan keluarga penguasa.

Langkah lain yang diambil Jokowi untuk memperkuat kekuasaannya adalah mengontrol institusi-institusi penting dan independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi terhadap UU KPK pada tahun 2019, yang kemudian mengubah status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), memicu protes luas. Namun, kekuasaan Jokowi tetap mampu meloloskan perubahan ini.<sup>13</sup> Tindakan yang dilakukan Jokowi ini membuat citra KPK kini seolah cocok dengan pernyataan “patuh terhadap kekuasaan seperti era Orde Baru.” Pernyataan ini sebenarnya mencerminkan berbagai kekhawatiran bahwa KPK, yang seharusnya independen, kini lebih tunduk pada kekuasaan politik, mirip dengan kondisi di masa Orde Baru di mana lembaga-lembaga negara seringkali dikendalikan oleh Pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana Jokowi menggunakan simbolisme dan kendali untuk menjaga stabilitas kekuasaannya, seperti layaknya raja Jawa yang mengandalkan loyalitas bawahan untuk bertahan. Dalam konteks ini, Jokowi tampaknya memanfaatkan strategi-strategi tradisional yang telah lama digunakan oleh para raja Jawa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Loyalitas bawahan dan kontrol terhadap lembaga-lembaga penting menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kekuasaan.

Di samping itu, salah satu konsep yang penting dan diilhami Jokowi adalah *manunggaling kawula gusti*, yang berarti persatuan antara pemimpin dan rakyat. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat, serta komitmen pemimpin untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks kepemimpinan Jokowi, konsep ini tercermin dalam gaya kepemimpinannya yang sederhana dan merakyat, serta kebijakan-kebijakan populis yang diimplementasikannya. Kebijakan-kebijakan populis yang diimplementasikannya, seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>14</sup> Namun, konsep ini juga memiliki kelemahan, terutama ketika diterapkan dalam

<sup>11</sup> Denty Piawai Nastitie, “Ketika Anak Presiden Berlomba-lomba Terjun di Gelanggang Politik”, dalam *Kompas.id*, 7 Juni 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/07/ketika-anak-presiden-berlomba-lomba-terjun-di-gelanggang-politik>, diakses pada 19 Oktober 2024.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Fabian Januarius Kuwado, “UU KPK Hasil Revisi Resmi jadi UU Nomor 19 Tahun 2019, dalam *Kompas.com*, 18 Oktober 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/11071961/uu-kpk-hasil-revisi-resmi-jadi-uu-nomor-19-tahun-2019>, diakses pada 19 Oktober 2024.

<sup>14</sup> Wiwie Heriyani, KIS, “Kartu Ajaib Era Jokowi yang Memudahkan Masyarakat Dapatkan Layanan Kesehatan Gratis”, dalam *SINDOnews.com*, 15 Oktober 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1472903/15/kis-kartu-ajaib->

konteks demokrasi kontemporer yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dalam beberapa kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional tidak selalu relevan dalam praktik demokrasi kontemporer. Bahkan karena minimnya pengawasan, banyak terjadi penyalahgunaan misal kebijakan KIS dan KIP yang tidak tepat sasaran atau macet dalam hal pengaplikasiannya.

Aspirasi lain Jokowi sebagai “penyelamat krisis” juga tidak jauh dari konsep tradisional Jawa, di mana raja dianggap sebagai pemimpin yang mendapat wahyu ilahi dan menjadi wakil Tuhan untuk melakukan penyelamatan di masa krisis.<sup>15</sup> Kebijakan-kebijakan Jokowi seringkali dibingkai sebagai upaya untuk menjaga kestabilan bangsa. Ini termasuk proyek ambisius seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terkesan dipaksakan untuk segera rampung. Bagi Jokowi, suksesnya pembangunan IKN adalah sebuah pementasan kekuasaan, layaknya seorang raja yang memamerkan keberhasilan kepada rakyatnya. Sama halnya seperti Raja Jawa yang gemar memamerkan kekuasaannya melalui berbagai simbol, Jokowi pun tidak berbeda. Megaprojek IKN terlihat seperti upaya mempertontonkan kekuasaan yang terburu-buru.<sup>16</sup> Bukan hanya berfungsi memperlihatkan keberhasilan pribadi di atas panggung politik nasional, tetapi juga menjadi ajang untuk mengukir namanya dalam sejarah. Terlepas dari berbagai penolakan yang muncul di masyarakat, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi ini seakan menghidupkan kembali pagelaran kekuasaan raja Jawa. Simbolisme yang digunakan, seperti mengusung anggota keluarga dalam politik atau pengontrolan lembaga-lembaga independen, adalah bagian dari upaya pelestarian tradisi kekuasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bukan lagi sekadar pagelaran politik kontemporer, melainkan sebuah panggung besar di mana tradisi kekuasaan lama dihidupkan kembali dalam baju demokrasi.

Ironi lain dalam kepemimpinan Jokowi adalah pendekatannya terhadap proyek-proyek infrastruktur besar. Jokowi seringkali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan dianggap sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik ambisi besar ini, terdapat isu-isu korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang seringkali mencuat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana nilai-nilai tradisional Jawa, seperti keadilan dan kebijaksanaan, benar-benar diterapkan dalam praktik kepemimpinan Jokowi. Selain itu, pendekatan Jokowi dalam menangani isu-isu politik juga menunjukkan kontradiksi yang menarik. Di satu sisi, Jokowi seringkali menggunakan pendekatan diplomasi yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai tradisional Jawa yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat. Namun, di sisi lain, Jokowi juga tidak segan-segan menggunakan kekuasaan politiknya untuk mengendalikan lembaga-lembaga penting, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

[era-jokowi-yang-memudahkan-masyarakat-dapatkan-layanan-kesehatan-gratis-1728947405](#), diakses pada 19 Oktober 2024.

<sup>15</sup> Imam Sutardjo, “Konsep Kepemimpinan “*Hashtabrata*” dalam Budaya Jawa”, *Jumantara*, Vol. 5 No. 2 (2014), <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3000459&val=27076&title=Konsep%20Kepemimpinan%20Hashtabrata%20dalam%20Budaya%20Jawa>

<sup>16</sup> Riska Kurnia Septiani, Sita Anggraeni, dan Sandra Dewi Saraswati, “Klasifikasi Sentimen Terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Media Sosial Menggunakan Naive Bayes”, *Teknika*, Vol. 16, No. 2 (2022), <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/teknika/article/view/4875>



Namun, aspek yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana Jokowi, di satu sisi, mendandani dirinya dalam balutan demokrasi, sementara di sisi lain, ia mempertontonkan kejayaannya dalam bingkai kekuasaan tradisional Jawa. Seakan-akan, panggung politik Indonesia tidak cukup untuk memuaskan hasrat akan kekuasaan, dan simbolisme feodal harus kembali hadir untuk memainkan peran sentral. Dalam konteks ini, Jokowi menjadi seorang aktor utama dalam drama besar di mana demokrasi dipadukan dengan tradisi raja Jawa, menghadirkan tontonan yang penuh dengan intrik dan pewarisan kekuasaan. Penampilan Jokowi sebagai Raja Jawa juga diperkuat melalui tindakan-tindakan simbolis seperti pelestarian budaya dan acara-acara kenegaraan yang diwarnai elemen tradisional. Ini mengingatkan kembali pada era Soekarno yang sering mengadakan pertunjukan wayang di Istana untuk mempertontonkan kekuatan politiknya. Seperti yang disampaikan oleh Kuntowijoyo dalam novel “Mantra Pejinak Ular,” pementasan tertentu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk melestarikan kepatuhan penonton kepada penguasa.<sup>17</sup>

Demokrasi saat ini tampaknya lebih mirip sebagai sebuah pementasan daripada sebuah sistem politik yang murni mengutamakan partisipasi rakyat. Langkah-langkah politik yang terstruktur dan penuh manuver ala Jokowi mencerminkan bagaimana kekuasaan bisa terpusat dan terkonsentrasi pada segelintir orang. Sebagai perumpamaan, demokrasi Indonesia kini lebih menyerupai ‘monarki yang disamarkan’ ketimbang demokrasi yang sebenarnya. Ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa politik Indonesia memiliki akar feodal yang belum sepenuhnya tercabut. Selanjutnya, dengan memusatkan kekuasaan di tangannya dan pewarisannya kepada generasi selanjutnya, Jokowi tidak jauh berbeda dengan raja Jawa yang melihat dirinya sebagai poros utama dalam segala aspek kehidupan politik dan sosial. Praktik politik ini menjadi kritik terhadap bagaimana demokrasi ini seharusnya bekerja. Dalam teori dan praktik, seharusnya proses pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan berlangsung secara lebih adil dan partisipatif, tidak terpusat pada satu tokoh “karismatik” atau keluarga tertentu saja. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, sangat penting bagi publik untuk terus mengkritisi dan meninjau setiap langkah politik dengan pandangan yang kritis dan terbuka. Menganggap segala tindakan sebagai bagian dari takdir atau wahyu yang menjadikan seorang pemimpin seolah kebal terhadap kritik, hanyalah mengembalikan kepemimpinan ke masa lalu yang penuh dengan kekuasaan feodal yang absolut.

Menggabungkan semua elemen ini, *apparent* bahwa Jokowi sedang memainkan peran yang penuh dengan simbolisme kekuasaan tradisional sambil tetap menjaga citra sebagai pemimpin demokratis. Dalam pandangan lebih mendalam, dapat dilihat bagaimana Jokowi mencoba menghidupkan kembali tradisi Raja Jawa dalam panggung politik kontemporer, memberi kesan bahwa demokrasi hanyalah keset yang digunakannya untuk menginjakkan kaki di atas panggung kekuasaan yang lebih besar.<sup>18</sup> Hal ini menciptakan dualisme dalam kepemimpinan yang diusung oleh Jokowi, di mana citra demokrasi dipertontonkan sementara kekuasaan yang sebenarnya tetap terpusat dan tradisional. Pada akhirnya, pagelaran demokrasi ala Jokowi menjadi sebuah ironi. Di satu sisi, ia mengusung demokrasi dan modernitas, sementara di sisi lain, ia mempraktikkan politik kekuasaan ala raja Jawa. Tentunya, bagi masyarakat yang mendambakan demokrasi murni, situasi ini bagaikan menyaksikan sebuah drama yang

<sup>17</sup> Jafar Lantowa dan Zilfa A. Bagtayan, “Sistem Religi Masyarakat Jawa dalam Novel Mantra Pejinak Ular Karya Kuntowijoyo (Kajian Antropologi Sastra”, *Jurnal Ikadbudi*, Vol. 6, No. 1 (2017), <https://journal.uny.ac.id/index.php/ikadbudi/article/view/18198>

<sup>18</sup> Masduki Duryat, *Jokowi: Dari Politik Dinasti, Politik Cawe-Cawe, Politisasi Bansos, Kualitas Demokrasi yang Makin Menurun Sampai Pada Politik Kekuasaan di Bidang Pendidikan* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024), hlm. 14-15.



akrab namun dengan plot yang mengejutkan. Pertarungan untuk menjaga keseimbangan antara panggung politik kontemporer dan tradisi warisan raja Jawa, memberikan sebuah tontonan yang memaksa publik untuk terus mempertanyakan, apakah ini demokrasi atau hanya sebuah sandiwara kekuasaan yang diperankan dengan sangat apik oleh seorang "Raja Jawa" bernama Jokowi.

## Penutup

Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dalam panggung politik Indonesia adalah sebuah pagelaran yang penuh dengan ironi dan kontradiksi. Di satu sisi, Jokowi berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat, yang seolah-olah menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional Jawa dalam praktik demokrasi modern. Namun di sisi lain, ada kecenderungan memadukan tradisi Jawa dalam politik, yang tak jarang menyulut kontroversi. Ia seringkali digambarkan sebagai "Raja Jawa" modern yang dekat dengan rakyatnya, menggunakan simbolisme dan kendali untuk menjaga stabilitas kekuasaannya. Dalam setiap langkahnya, Jokowi seringkali menampilkan sifat *soft power* khas Jawa, di mana perundingan dan harmoni lebih diutamakan daripada konfrontasi langsung. Akan tetapi, publik tidak bisa mengabaikan bahwa dalam setiap pagelaran, ada narasi yang disusun, karakter yang dimainkan, dan peran yang disesuaikan. Demokrasi, istilah megah yang acap kali dipahami sebagai suara rakyat, kini kadang terlihat seperti permainan ilusi. Menarik untuk melihat, bagaimana tradisi Jawa yang sarat akan harmoni dapat diterjemahkan menjadi alat diplomasi dalam lanskap politik Indonesia yang bergejolak.

Kritik utama tidak hanya tertuju pada Jokowi sebagai individu, melainkan pada sistem yang mungkin terlalu asyik dengan narasi tradisional tanpa benar-benar menggali keinginan rakyat. 'Wayang' politik yang dimainkan, bisa jadi membuai penonton dengan alur yang menarik, tetapi melupakan bahwa rakyat harusnya bukan sekadar penonton. Mereka adalah aktor utama dalam demokrasi. Memadukan tradisi dan modernitas bukanlah perkara mudah. Namun, jika hanya menonjolkan elemen tradisi tanpa memberikan ruang bagi kemajuan yang substansial, apakah demokrasi semata-mata menjadi dekorasi? Jokowi memang ahli dalam menggunakan pendekatan Jawa untuk menciptakan tenang di permukaan. Namun, ketenangan ini, selayaknya menjadi landasan untuk perubahan yang lebih mendasar, bukan sekadar untuk menjaga stabilitas sementara.

Pada akhirnya, publik harus terus waspada dan kritis. Mengapresiasi usaha itu penting, tapi juga harus memastikan bahwa pagelaran demokrasi tidak hanya berhenti pada tataran permukaan. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi ruang pada suara yang beragam, bukan sekadar membiarkan suara mayoritas tenggelam dalam gemuruh hiruk-pikuk panggung politik. Inilah tantangan bagi penguasa berikutnya. Ia harus mampu membangun demokrasi yang tidak hanya cantik di permukaan, tetapi juga kuat dan berdaya tahan. Pada akhirnya, pementasan demokrasi ini harus kembali kepada prinsip dasarnya, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah warisan terbesar yang harus dijaga, melampaui tradisi dan panggung politik itu sendiri.

## Daftar Rujukan

- Administrator. "Tafsir Jawa terhadap Kuasa dan Kekuasaan", *Indonesia.go.id*, <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/tafsir-jawa-terhadap-kuasa-dan-kekuasaan>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Duryat, Masduki. *Jokowi: Dari Politik Dinasti, Politik Cawe-Cawe, Politisasi Bansos, Kualitas Demokrasi yang Makin Menurun Sampai Pada Politik Kekuasaan di Bidang Pendidikan*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Hafiz, Kahfi Adlan. "Memetik Pelajaran dari Fenomena Dinasti Politik Filipina", *detikNews*, <https://news.detik.com/kolom/d-6180297/memetik-pelajaran-dari-fenomena-dinasti-politik-filipina>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Hayes, Rupert Wingfield. "Kim Jong-un: Bukan 'putra mahkota' tapi akhirnya menjadi pemimpin Korea Utara", *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44355690>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Heriyani, Wiwie. "KIS, Kartu Ajaib Era Jokowi yang Memudahkan Masyarakat Dapatkan Layanan Kesehatan Gratis", *SINDOnews.com*, <https://nasional.sindonews.com/read/1472903/15/kis-kartu-ajaib-era-jokowi-yang-memudahkan-masyarakat-dapatkan-layanan-kesehatan-gratis-1728947405>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Hidayat, Komaruddin dan Putut Widjanarko. *Reinventing Indonesia: menemukan kembali masa depan bangsa*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2008.
- Imam Sutardjo, "Konsep Kepemimpinan "Hastabrata" dalam Budaya Jawa", *Jumantara*, Vol. 5 No. 2 (2014), <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3000459&val=27076&title=Konsep%20Kepemimpinan%20Hastabrata%20dalam%20Budaya%20Jawa>
- Jafar Lantowa dan Zilfa A. Bagtayan, "Sistem Religi Masyarakat Jawa dalam Novel Mantra Pejina Ular Karya Kuntowijoyo (Kajian Antropologi Sastra)", *Jurnal Ikadbudi*, Vol. 6, No. 1 (2017), <https://journal.uny.ac.id/index.php/ikadbudi/article/view/18198>
- Kinapti, Tyas Titi. "7 Bukti Kesederhanaan Jokowi, dari Jajan Kaki Lima sampai Naik Transportasi Umum", *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/hot/read/3994825/7-bukti-kesederhanaan-jokowi-dari-jajan-kaki-lima-sampai-naik-transportasi-umum>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Kuntowijaya. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.
- Kuwado, Fabian Januarius. "UU KPK Hasil Revisi Resmi jadi UU Nomor 19 Tahun 2019", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/11071961/uu-kpk-hasil-revisi-resmi-jadi-uu-nomor-19-tahun-2019>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Nastitie, Denty Piawai. "Ketika Anak Presiden Berlomba-lomba Terjun di Gelanggang Politik", *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/07/ketika-anak-presiden-berlomba-lomba-terjun-di-gelanggang-politik>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Nugroho, Ajiakto Dwi dan Bimo. *Jokowi: Politik tanpa Pencitraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Nursyamsi, Muhammad. "Popularitas Melejit, Jokowi Disebut Sukses Sinergikan Kerja Para Menteri", *Republik*, <https://news.republika.co.id/berita/roy12f502/popularitas-melejit-jokowi-disebut-sukses-sinergikan-kerja-para-menteri>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Riska Kurnia Septiani, Sita Anggraeni, dan Sandra Dewi Saraswati, "Klasifikasi Sentimen Terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Media Sosial Menggunakan Naive Bayes", *Teknika*, Vol. 16, No. 2 (2022), <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/teknika/article/view/4875>

- Shabrina, Dinda. “Bahlil: Hati-hati Terhadap Raja Jawa kalau tidak Mau Celaka”, *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/694569/bahlil-hati-hati-terhadap-raja-jawa-kalau-tidak-mau-celaka>, diakses pada 19 Oktober 2024.
- Wachid Eko Purwanto, “Konsep Pemikiran Soeharto dalam Butir-butir Budaya Jawa”, *Bahastra*, Vol. 37, No. 1 (2017), <https://adoc.pub/konsep-kepemimpinan-soeharto-dalam-butir-butir-budaya-jawa.html>
- Yusuf Wibisono, “Falsafah Bangsa dan Budaya Jawa dalam Pemikiran Soeharto”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 41 No. 68 (2020), <https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/874/0>